

**ANALISIS PENGAWASAN INTERNAL DAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



OLEH :

Nama	: Putri Ayu Sushmita
Npm	: 1805170167
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, Pukul 13:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : PUTRI AYU SUSHMITA
NPM : 1805170167
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN INTERNAL DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DELLSERDANG

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Assoc. Prof Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, SE., M.Si.)

Pembimbing

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : PUTRI AYU SUSHMITA

NPM : 1805170167

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN INTERNAL DAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 14 Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(Prof. Dr. HENRI NURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Putri Ayu Sushmita

Npm : 1805170167

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Internal Dan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, dan data-data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari instansi tersebut, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 01 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Putri Ayu Sushmita



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Ayu Sushmita
NPM : 1805170167
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsa, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Pengawasan Internal Dan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perjelas Fenomena tambah teori	22/6 2022	
Bab 2	Perbaiki Pengutipan teori		
Bab 3	Perjelas definisi Operasional	29/6 2022	
Bab 4	Pembahasan Kinerja kaitkan dengan kriteria Penilaian		
Bab 5	Perjelas	5/7 2022	
Daftar Pustaka	Perbaiki daftar Pustaka	7/7 2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan, Acc Sidang	14/7 2022	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr ZELIA HANUM, SE, M.Si)

Medan, 14 Juli 2022
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)

ABSTRAK

Analisis Pengawasan Internal dan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Putri Ayu Sushmita
Program Studi Akuntansi
Email : putriayusushmita@gmail.com

Berkaitan dengan pengawasan internal, perlu adanya pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan internal adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus adanya pertanggungjawaban untuk memberikan gambaran pemanfaatan secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan internal dan kinerja instansi pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara wawancara dan data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengawasan internal dan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 yaitu pada komponen evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja dikarenakan Pandemi Covid-19

Kata Kunci : Pengawasan Internal dan Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRACT

Analysis of Internal Supervision and Performances of Government Agencies at the Department of Industry and Trade of Deli Serdang Regency

Putri Ayu Sushmita
Accounting Study Program
Email : putriayusushmita@gmail.com

With regard to internal control, there is a need for accountability in accordance with Government Regulation no. 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System, internal control is an integral process of actions and activities carried out continuously by the leadership and all employees to provide adequate confidence in the achievement of organizational goals through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, security state assets, and compliance with laws and regulations. The accountability report on the performance of government agencies must be accountable to provide an overview of optimal utilization. The purpose of this study was to identify and analyze the internal control and performance of government agencies at the Department of Industry and Trade, Deli Serdang Regency. This research method is descriptive using qualitative data types, this research was conducted with data received from the Department of Industry and Trade Deli Serdang Regency. The data of this research are primary data and secondary data. Primary data is done by interview and secondary data is done by means of documentation. The results of this study indicate that the internal control and performance of government agencies at the Department of Industry and Trade of the Deli Serdang Regency experienced a decline in 2019-2022, namely in the performance reporting due to the Covid-19 pandemic.

Keywords : Internal Monitoring and Government Agency Performance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas Ridho dan Hidayah-Nya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan, serta shalawat beriring salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan memperoleh gelar S.Ak Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan doa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua ayahanda Ok Hadi Hamdan dan ibunda Rolina yang telah memberikan doa, bimbingan, nasehat, pengorbanan finansial untuk penulis. Dan keluarga yang telah mendukung mendoakan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE., M.M.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si., selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar S.E, M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj. Hafсах, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan izin riset dan memberikan data atau informasi kepada penulis.
11. Dan teman-teman saya yang telah memberikan semangat, dukungan dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selau melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya kepada kita semua. Dan Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Dengan demikian besar harapan penulis untuk saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal'amin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 Maret 2022

Penulis

Putri Ayu Sushmita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1. 2. Identifikasi Masalah	8
1. 3. Rumusan Masalah	8
1. 4. Tujuan Penelitian.....	9
1. 5. Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Uraian Teoritis.....	10
2.1.1 Pengawasan Internal.....	10
2.1.1.1 Pengertian Pengawasan Internal	10
2.1.2 Kinerja Instansi Pemerintah	13
2.1.2.1 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah	13
2.1.2.2 Manfaat Kinerja Instansi Pemerintah.....	13
2.1.2.3 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.....	14
2.1.2.4 Indikator Kinerja Instansi Pemerintah	15
2. 2. Penelitian Terdahulu	15
2 .3. Kerangka Berfikir.....	20

BAB 3 METODE PENELITIAN.....	23
3. 1. Pendekatan Penelitian	23
3. 2. Definisi Operasional.....	23
3. 3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
3.3.1 Tempat Penelitian.....	25
3.3.2 Waktu Penelitian.....	25
3.4. Jenis dan Sumber Data	26
4.3.1 Jenis Data.....	26
4.3.2 Sumber Data.....	26
3. 5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3. 6. Teknik Analisis Data.....	27
BAB 4 HASIL PENELITIAN	29
4. 1. Deskripsi Data	29
4. 2. Analisis Data	29
4.1.1Pengawasan Internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.....	29
4.2.1Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Deli Serdang.....	37
4. 3. Pembahasan.....	38
4.1.3Pengawasan Internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.....	38
4.2.3 Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.....	43
BAB 5 PENUTUP.....	46
5.1. Kesimpulan.....	46
5. 2. Saran	47
5. 3 Keterbatasan Penelitian.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2021..	7
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 1.3 Waktu Penelitian	25
Tabel 1.4 Kisi-kisi Wawancara	27
Tabel 1.5 Anggaran Biaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019-2021	34
Tabel 1.6 Kriteria Penilaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.	38
Tabel 1.7 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan golongan.....	56
Tabel 1.8 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
Tabel 1.9 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Jabatan.....	57
Tabel 1.10 Hasil Wawancara	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 . 1 Kerangka Berfikir.....	22
Gambar 2 . 2 Struktur Organisasi.....	54

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang merupakan sebuah instansi pemerintah daerah yang berada langsung dibawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai dengan namanya DISPERINDAG membawahi segala aktifitas terkait perindustrian dan perdagangan yang ada di tingkatan daerah atau provinsi.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi yang penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan yang desentralistik partipatoris (Mardiasmo, 2006).

Peran seorang pegawai sangat penting dalam perkembangan instansi, jika telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja dari organisasi. Hal lain yang mempengaruhi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah pengendalian intern. Pengendalian intern akuntansi yang berfungsi untuk mengatur teknik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan pengendalian intern, laporan serta pengawasan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu dari dua

subsistem dalam sistem pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, SKPD diberikan kuasa untuk menggunakan alokasi dana (anggaran) dan barang atau aset yang dibutuhkan. Pelimpahan kuasa tersebut tidak hanya berisi hak untuk menggunakan dana, namun juga berimplikasi pada sisi kewajiban, yaitu SKPD wajib mewujudkan target kinerja dari usulan kegiatan di anggarannya. Dana publik yang menjadi hak SKPD tidak dikeluarkan tanpa suatu tujuan, namun ada target kinerja yang harus diwujudkan.

Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang sangat penting, karena tujuan dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan berhasil atau tidak tergantung dari faktor manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. Untuk memperoleh kemajuan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pimpinan perlu menggerakkan serta memantau pegawainya agar dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang dimilikinya.

Pengawasan internal dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengawasan Internal ini dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif. Pengawasan bersifat akuntansi yaitu bagian dari sistem pengawasan internal, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sedangkan, pengawasan administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan

terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengawasan Internal merupakan fungsi manajemen yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan internal dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut (Arifin Sabeni, 1997) pengawasan internal merupakan suatu alat pengawasan dari pemimpin organisasi untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana-rencana dan kebijakan yang telah ditentukan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Mardiasmo, 2004). Instruksi presiden no. 15 tahun 1983 menyebutkan ada dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Pengawasan atasan langsung dimaksud dapat melakukan pengamatan setiap saat yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan, disertai pemberian petunjuk atau tindakan korektif bila diperlukan. Sedangkan pengawasan fungsional dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat/unit organisasi yang dibentuk atau ditugaskan untuk melakukan

pengawasan dalam batas-batas lingkungan kewenangan yang ditentukan.

Pentingnya tentang kinerja pemerintah daerah juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan. Hal yang harus diperhatikan antara lain aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Kinerja keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus Dwiyanto, 2002). Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menurut LAN dan BPKP (LAN & BPKP, 2000) akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup

akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan-pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

LAKIP merupakan suatu laporan kinerja instansi yang bersifat vertikal yaitu laporan kepada instansi yang di atasnya dan kepala Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. Alur pelaporan LAKIP untuk pemerintah kota dan kabupaten sesuai dengan inpres No.7 Tahun 1999 (Sihaloho, F.Laurensius dan Halim, 2010).

Pengawasan internal dan kinerja instansi pemerintahan sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja para pegawai, kinerja ditahun berikutnya dan memulihkan kinerja dalam suatu program. Sebuah instansi selalu berusaha agar setiap pegawai yang terlibat didalamnya dapat mencapai efektivitas kerja. Keberhasilan suatu organisasi dimulai dari keberhasilan masing-masing pegawai yang bersangkutan. Suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan dengan menggunakan segala sumber daya manusia.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di jalan Tanjung Garbus komp. Pemkab. Deli Serdang. Di dalam wawancara tersebut bagian program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang mengatakan masih sulitnya melaksanakan koordinasi atau pengawasan internal dalam pelaksanaan kegiatan perindustrian dan perdagangan dengan pihak terkait. Karena, dalam pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan diperlukan adanya informasi dan komunikasi secara berkelanjutan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara serta dinas-dinas terkait di Kabupaten Deli

Serdang. Berkaitan dengan hal ini diperlukan persepsi, pola pikir dan pola tindak yang sama dalam melaksanakan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka penyusunan program pembangunan industri dan perdagangan, kegiatan-kegiatan yang diusulkan perlu disinkronkan antara kebijakan atau program prioritas pada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara serta Instansi terkait lainnya di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan potensi nyata yang ada dan memberikan dampak pengembangan terhadap Kabupaten Deli Serdang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang merupakan penerapan sistem pertanggungjawaban sesuai dengan Perpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu untuk memberikan gambaran pemanfaatan secara optimal sumberdaya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Deli Serdang sudah berupaya melakukan perubahan kearah perbaikan dan telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat,

jelas dan terukur dalam bentuk LAKIP dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah yang disusun dalam suatu Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

Berikut LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2021

No	Komponen yang Dinilai	Nilai		
		2019	2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	100%	100%	100%
2	Pengukuran Kinerja	76,33%	76,33%	76,33%
3	Pelaporan Kinerja	76,33%	73%	72%
4	Evaluasi Kinerja	76,33%	73%	72%
5	Pencapaian Kinerja	72,25%	80%	80%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 1.1 dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2021 mengalami penurunan yang terdapat pada komponen pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Dikarenakan pada tahun 2020-2021 terjadinya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan kurangnya kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun sebaik-baiknya. Beberapa pegawai melakukan tugasnya WFH (*work from home*) dan WFO (*work from office*) yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19*. Selama Pandemi *Covid-19* terdapat pengurangan Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang, sehingga kinerja yang dicapai tidak maksimal hal ini mengakibatkan perindustrian dan perdagangan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tidak memenuhi target.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan judul “**Analisis Pengawasan Internal Dan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang masih sulit melaksanakan koordinasi atau pengawasan internal dengan pihak tertentu, dalam aspek identifikasi resiko di lingkungan pengendalian.
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan dari tahun 2019-2021.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan internal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan internal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan mengenai analisis pengawasan internal dan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan atau arahan yang bermanfaat bagi pihak instansi pemerintah dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam instansi pemerintah untuk menyelesaikan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan instansi secara optimal.

3. Bagi Peneliti Lain

Untuk menambah wawasan mengenai analisis pengawasan internal dan kinerja instansi pemerintah. Dan sebagai bahan referensi perbandingan bagi peneliti lain.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pengawasan Internal

2.1.1.1 Pengertian Pengawasan Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan menyebutkan bahwa pengawasan internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Siagian dikutip (Kadarisman, 2013) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan, menurut (Muh. Abdul Halim, 2018) pengawasan adalah tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal.

Pengawasan dilakukan dalam upaya untuk menyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan disini diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan agar mereka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna. Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadi penyimpangan, pemborosan, hambatan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal kegiatan dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2.1.1.2 Tujuan Pengawasan Internal

Pengawasan Internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu pimpinan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui pengawasan internal yang efektif, pimpinan lembaga pendidikan juga dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai. Pengawasan dari dalam (*Internal Control*) berarti “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang terbentuk didalam organisasi itu sendiri”. Aparat/Unit pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan organisasi.

Menurut (Sawyer’s 2005) tujuan pengawasan internal adalah:

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Efektivitas dan efisiensi operasi.
3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yg berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal dalam suatu lembaga pendidikan merupakan fungsi staff yang melakukan penilaian secara bebas atau tidak memihak dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan melaporkan hasil pekerjaannya.

2.1.1.3 Unsur-unsur Pengawasan Internal

Menurut IAI dan KAP (SAP 2001, SA Seksi 319) yang mengemukakan lima unsur pengendalian intern:

1. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya, lingkungan pengendalian intern, penyediaan disiplin dan struktur.
2. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana harus dikelola.
3. Pengendalian adalah kebijakan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian. Penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat 5 unsur pengendalian intern yang bertujuan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien serta dapat memberikan pemahaman yang baik pada tingkat instansi secara keseluruhan maupun pada fungsi atau aktivitas.

2.1.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Internal

Menurut (Mulyadi 2007), ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan internal:

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
3. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi yang pastinya memerlukan pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan internal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab dari organisasi, sehingga yang bertanggung jawab bukanlah pimpinan organisasi tetapi, seluruh anggota di dalamnya.

2.1.2 Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut (Mangkunegara, 2015) istilah kinerja berasal dari *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut (Prawirosentono, 2008) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

(LAN, 2003) menyebutkan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang bagi suatu proses yang berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

2.1.2.2 Manfaat Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut (Mardiasmo, 2009) bahwa manfaat pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah diterapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas bahwa, kinerja instansi pemerintah menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

2.1.2.3 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

(Mardiasmo, 2005) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa, pengukuran kinerja instansi pemerintah adalah tindakan yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas. Hasil pengukuran digunakan sebagai tindakan efektif dan efisien yang akan memberikan informasi

tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana yang dimana memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

2.1.2.4 Indikator Kinerja Instansi Pemerintah

(Mardiasmo, 2004) juga menambahkan bahwasanya untuk melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan indikator kinerja yang kemudian akan dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. (LAN, 2003) mendefinisikan indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dan untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang terbagi dalam enam kelompok indikator yaitu :

1. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya: sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Proses (*process*) adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
4. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
6. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa, indikator kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kinerja dalam satu tahun. Selain itu, indikator kinerja dapat meningkatkan kinerja untuk tahun kedepannya. Sehingga dapat meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang hubungan variabel-variabel penelitian dengan pengujian hipotesis yang telah dirumuskannya. Di dalam

penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kajian teoritis yang baru.

Persamaan didalam penelitian ini yaitu menjelaskan tentang pengawasan internal dengan menjelaskan pertanggung jawaban pada kinerja instansi pemerintah. Sedangkan, perbedaan pada penelitian ini menggunakan 2 variabel, penelitian terdahulu menggunakan 2 atau lebih variabel, dan memiliki perbedaan objek yang akan diteliti.

Adapun ringkasan yang dapat dilihat pada tabel dibawah mengenai kesimpulan peneliti terdahulu, sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Zulia Hanum (2009)	Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pengeluaran Kas.	Hasil jurnal penelitian adalah pengawasan intern memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan pengeluaran kas, untuk itu diperlukan suatu sistem yang terdiri dari prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan peraturan dan skema yang ada.	Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2.	Hafsah, Ramdhansyah, Hasan Sakti Siregar (2014)	Analisis kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.	Hasil analisis data bahwa masih terdapat berbagai kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.	Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Berkelanjutan Bangsa Berbasis

			Kelemahan tersebut antara lain kelemahan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), atau tepatnya sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.	Iptek.
3.	Eka Nurmala Sari, Muhyarsyah (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Sumatera Utara.	Hasil penelitian adalah sistem pengendalian internal dan ketersediaan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah.	Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4.	Widya Astuty (2016)	Peran Auditor Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Pelaksanaan Tata kelola Pemerintahan yang Baik.	Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan peran auditor internal dan pengendalian intern secara bersama-sama terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.	Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5.	Fitriani Saragih (2014)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good	Hasil Penelitian adalah Good Governance mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD	Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

		Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD SE Kota Medan.	di Kota Medan. Pengaruh good government governance terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Medan sangat rendah yaitu sebesar 0,1%. Hal ini berarti pemerintahan yang baik di SKPD di Kota Medan belum mampu meningkatkan kinerja keuangannya.	
6.	Agustinus Widanarto (2006)	Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal, Dan Kinerja Pemerintah	Hasil Penelitian adalah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah kinerja Pemerintah Kota Bandung yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan internal dan pengawasan eksternal terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung dan mengembangkan konsep pengawasan, sehingga diperoleh strategi dalam meningkatkan fungsi pengawasan	Jurnal Penelitian Universitas Padjadjaran

			internal dan pengawasan eksternal agar mampu mendorong pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Bandung.	
7.	Sri Mifti, Nugroho Budi Lestariya, Anacostia kowanda (2009)	Pengawasan Internal dan Kinerja (Suatu kajian di kantor Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri)	Hasil Penelitian adalah program pengawasan internal dan kondisi sumber daya berpengaruh negatif terhadap kinerja pengawasan, baik pada kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan sarana dan prasarana.	Jurnal Penelitian Universitas Gunadarma
8.	Bambang Jatmiko (2020)	Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Hasil Penelitian adalah Pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.	Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

9.	Titien Sulistiawaty (2018)	Pengawasan Internal Pada Produktivitas Kerja Pegawai	Hasil Penelitian adalah pengawasan internal oleh pimpinan pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kinerja pegawai di mana pegawai bekerja.	Jurnal Penelitian Universitas Madura.
----	----------------------------	--	--	---------------------------------------

2.3 Kerangka Berfikir

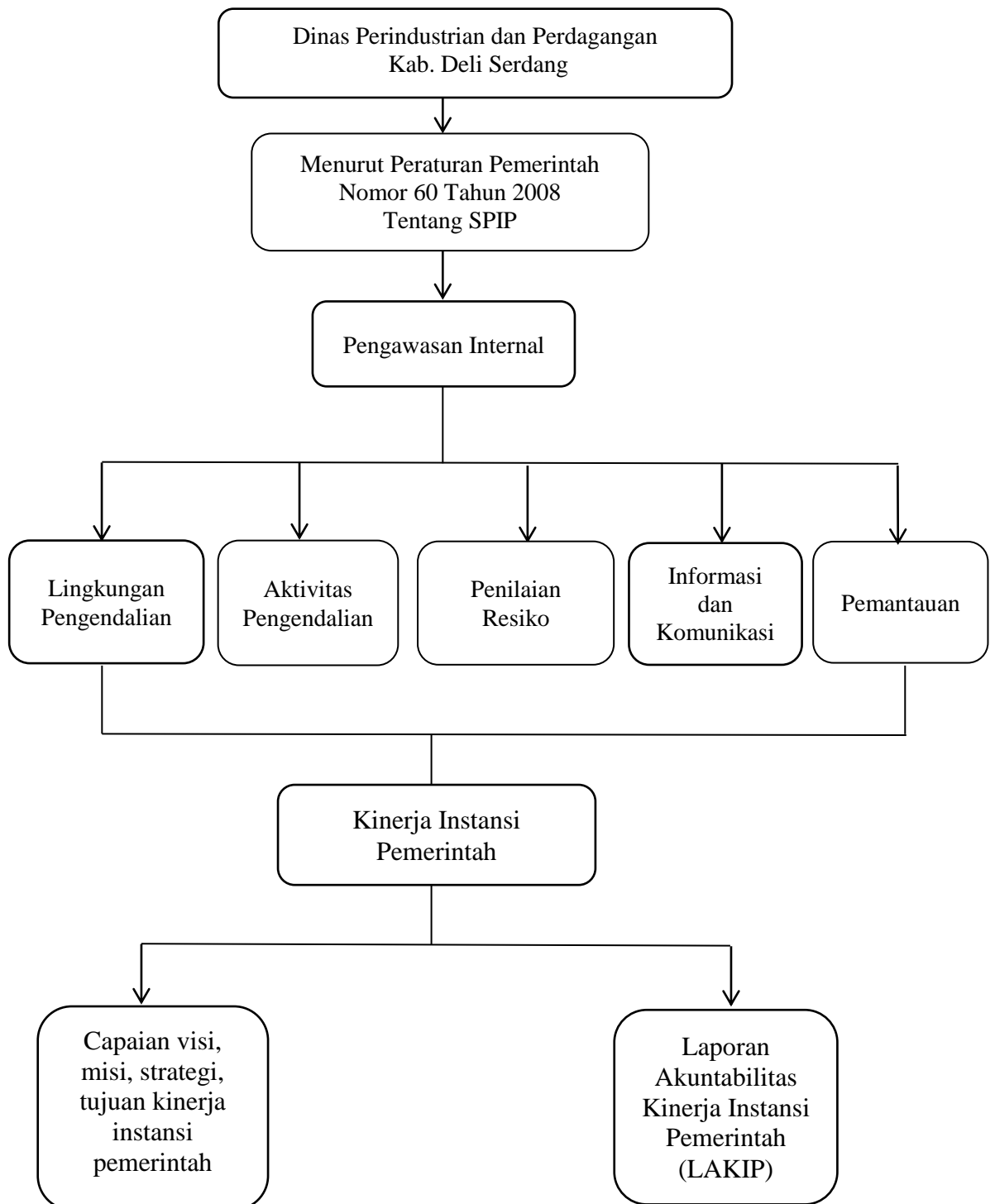
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang serta Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

Aktivitas operasional kinerja instansi pemerintahan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang bekerja di instansi pemerintahan. Dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan maka diperlukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang diterapkan pemerintah. Bagaimana pertanggung jawaban dari pelaporan serta komitmen organisasi yang ada. Dengan adanya fenomena yang terjadi dapat dilihat dari laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah atau LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

Pengawasan internal dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan internal diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan agar mereka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna. Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan, dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan internal dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan internal yang dilaksanakan akan memberikan dampak baik kinerja pemerintah daerah yang dicapai.

Pentingnya LAKIP sebagai upaya dan bentuk pengawasan internal dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat dalam melaksanakan tugas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja organisasi satu tahun yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan menentukan, mengumpulkan, dan menganalisis data-data penelitian yang diperoleh dari instansi, berhubungan masalah yang dihadapi, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya diberikan saran.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan variabel-variabel penelitian yang menjadi objek. Menurut (Sugiyono, 2007) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

3.2.1 Pengawasan Internal

(Rai, 2008) menyatakan bahwa sistem pengawasan internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya. Pengawasan internal ini diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengawasan internal juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Adanya pengawasan internal memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dapat diamati dan dikelola kesesuaiannya dengan rencana

dalam mencapai tujuan (Terry,1960).

Dalam pemilihan operasional Variabel yang digunakan adalah pengawasan internal yang meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang menyediakan landasan bagi kelangsungan pengendalian intern dalam suatu organisasi.
- b. Aktivitas Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif.
- c. Penilaian Resiko bertujuan menetapkan terjadinya dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi.
- d. Informasi dan Komunikasi digunakan untuk pemberitahuan mengenai aktivitas di dalam proses pengawasan internal dan kinerja instansi pemerintahan.
- e. Pemantauan sebagai proses kualitas kinerja pengawasan internal dalam kegiatan suatu program yang dijalankan.

3.2.2 Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

3.4 Jenis dan Sumber Data

4.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Peneliti mengambil data kualitatif dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian berupa penjelasan.

4.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari pihak yang bersangkutan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data yang sudah ada atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan beberapa pihak yang berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

Tabel 1. 4 Kisi-kisi Wawancara

No	Keterangan	Kisi-Kisi Wawancara
1.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang SPIP. <ol style="list-style-type: none"> a. Lingkungan Pengendalian b. Aktivitas Pengendalian c. Penilaian Resiko d. Informasi dan Komunikasi e. Pemantauan 2. Proses pengawasan internal dalam kinerja instansi Pemerintah.
2.	Kinerja Instansi Pemerintah	<p>Berdasarkan LAKIP dan Survey yang dilakukan dilapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya tanggap pegawai terhadap aktivitas pekerjaan yang dilakukan (Menurut Sinambela) 2. Mewujudkan visi dan misi (Berdasarkan LAKIP) 3. Pencapaian output dengan input (sumber daya) yang ada (Berdasarkan LAKIP) 4. Sumber daya manusia sesuai dengan bidang-bidang (Menurut Mardiasmo). 5. Meningkatkan kinerja seluruh pegawai (Berdasarkan LAKIP) 6. Penjelasan dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). 7. Kelengkapan sarana dan prasarana (Berdasarkan Survey Objek)

2. Dokumentasi, yaitu catatan atau dokumen yang diminta, berhubungan dengan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lengkap untuk memperkuat hasil penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis

deskriptif yaitu menganalisa dan mendeskripsikan serta membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang dipakai sehingga dapat memberikan informasi dan dapat ditarik kesimpulan.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dan berdiskusi langsung tentang laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Mengumpulkan data dokumentasi yaitu dengan cara mencatat atau mengambil data yang dibutuhkan secara objektif.
3. Menganalisis atau menjelaskan keadaan di tempat penelitian yang sebenarnya dengan data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.
4. Mengambil kesimpulan dari uraian dan hasil analisis yang dilakukan.
5. Memberikan saran tentang pengawasan internal dan kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan dan mencapai keefektifitasannya.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Dalam bab ini penulis menjelaskan seluruh hasil penelitian yang sudah penulis temukan saat melakukan riset lapangan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

Objek pada penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pengawasan internal dan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami penurunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa dokumen-dokumen bagian instansi pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang seperti, dokumen LAKIP, data pegawai, jumlah pegawai, struktur organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari Kassubag Umum dan Bagian program.

4.2 Analisis Data

4.1.1 Pengawasan Internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang memiliki komitmen yang tinggi agar pengawasan internal berjalan dengan baik.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ibu Jamilah, SH selaku Kassubag Umum di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa “Pengawasan internal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dibidang perindustrian dan perdagangan”. Hal tersebut juga diperkuat dengan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam Perindustrian dan Perdagangan dengan adanya informasi dari pegawai yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dari berbagai bidang-bidang seperti, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar, bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Adapun pengendalian internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian.

Pengendalian internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang meliputi:

a. Integritas dan Etika

Untuk mendukung terciptanya integritas dan etika yang baik Dinas perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan yaitu:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10).
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849).

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang kedisiplinan pegawai.

Dengan adanya peraturan yang ditetapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dapat mewujudkan sektor Perindustrian dan Perdagangan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan serta meningkatkan kedisiplinan masuk kantor, istirahat, dan pulang.

Untuk penegakan kedisiplinan pegawai maka setiap pegawai harus mengisi absen masing-masing setiap harinya sesuai dengan waktu kehadiran, tujuan dari pengisian absen untuk melihat kejujuran pegawai yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan bahwa pengawasan internal dalam aspek integritas dan etika berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Komitmen dan Kompetensi

Pengawasan internal pada aspek komitmen dan kompetensi berjalan dengan baik sesuai dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Setiap pegawai memiliki kompetensinya dalam melaksanakan tugas masing-masing. Sumber daya yang hebat adalah sumber daya yang memiliki kompetensi dan komitmen dengan adanya sumber daya maka suatu pekerjaan akan terlaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kompetensi dan bimbingan dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan teknis tugas pokok masing-masing.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan bahwa, komitmen terhadap kompetensi berjalan dengan baik.

c. Kepemimpinan

Pimpinan memberikan intruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan pegawai yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Jamilah SH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang bahwa: “Setiap pimpinan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang menjalin hubungan baik dengan bawahan dan setiap keputusan yang dilakukan dengan cara meminta pendapat ketika ada masalah yang dihadapi dan pimpinan mengambil keputusan tidak dengan sepihak. Contohnya dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan kendala yang dialami dari pegawai dalam menjalankan tugas yang diamanatkan”.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang disampaikan bahwa kepemimpinan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik, menjalin hubungan dengan pegawainya dan pimpinan selalu memberikan saran dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang telah disusun secara jelas dan sistematis, sehingga tidak ada tugas yang dirangkap dan dapat menimbulkan penyimpangan. Struktur organisasi menggambarkan uraian tugas yang jelas, tanggung jawab, fungsi tugas yang dapat memudahkan pekerjaan seseorang dengan adanya struktur organisasi yang dibuat oleh Kepala Dinas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

Struktur organisasi dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Struktur organisasi

dibuat sesuai dengan bidang-bidang sehingga dapat memudahkan dalam menjalankan tugas di berbagai bidang-bidang.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan bahwa, struktur organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan pertanggung-jawaban pegawai-pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

2. Aktivitas Pengendalian

Adapun aktivitas pengendalian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang meliputi:

a. Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi yang dilakukan yaitu apakah ada pemisahan fungsi operasional, pencatatan, dan pengawasan. Pemisahan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Ibu Jamillah SH, mengatakan bahwa: “Sudah ada pemisahan fungsi yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing yaitu fungsi pencatatan dan operasi di berbagai bidang-bidang”.

Adapun pemisahan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

1. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang industri, dalam pelaksanaan tugas.
2. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dalam dan luar negeri.
3. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

4. Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan analisis perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pasar serta melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pasar, penataan ketertiban dan kebersihan pasar serta pemungutan retribusi pasar.

b. Dokumen

Data-data yang diperlukan dalam pengendalian intern di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang yaitu:

1. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Laporan ini berisi tentang pertanggung jawaban kegiatan yang terdiri dari berbagai indikator perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian.

2. Data Anggaran biaya setiap tahunnya

Anggaran biaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 1. 5 Anggaran Biaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun
2019-2021**

Keterangan	Tahun		
	2019	2020	2021
Anggaran Kegiatan	Rp 30.779.436.542,00	Rp 16.741.870.165,00	Rp 39.597.842.747,00
Realisasi Anggaran	Rp 23.492.759.396,00	Rp 12.251.399.459,00	Rp 27.417.751.774,00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli serdang

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan bahwa “Setiap laporan kinerja instansi pemerintah dan anggaran kegiatan setiap tahunnya harus dijelaskan secara rinci agar tidak terjadinya penyimpangan”.

c. Pencatatan

Penilaian terhadap pencatatan didasarkan pada pencatatan transaksi secara tepat waktu dan sesuai pedoman pencatatan. Pencatatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap transaksi yang telah dicatat secara tepat waktu dan akurat.

d. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sistem operasi dan prosedur yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Deli Serdang dan setiap pegawai yang menjalankan tugasnya sesuai dengan rangkaian prosedur yang dimiliki oleh instansi. Laporan keuangan sudah termasuk anggaran, realisasi, dan persentase pencapaian setiap tahunnya.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti bahwa aktivitas pengendalian berjalan dengan baik sesuai dengan arahan adanya pemisahan fungsi yang sudah disusun berdasarkan bidang-bidang, dokumen dan pencatatan yang dibuat sesuai dengan prosedur.

3. Penilaian Resiko

Sistem pengendalian internal terhadap unsur penetapan resiko pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang adalah :

a. Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang berjalan tidak baik. Dikarenakan masih sulitnya melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan perindustrian dan perdagangan dengan pihak terkait secara terus-menerus.

b. Analisis resiko

Analisis resiko di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang berjalan baik untuk mengawasi pengendalian resiko dan menggunakan teknologi dibagian sektor industri dan sektor perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa identifikasi resiko tidak berjalan dengan baik. Tetapi, dalam analisis resiko berjalan dengan baik dikarenakan adanya pengawasan didalam bidang-bidang.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik dengan melaksanakan sistem informasi dan komunikasi dengan secara terkomputersasi. Untuk mencapai kemudahan dan penghematan waktu penyampaian. Hal ini dapat dilihat dari sistem yang di terapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang menggunakan aplikasi software untuk membantu proses laporan keuangan dan kinerja pegawai.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti bahwa, informasi dan komunikasi berjalan dengan baik dikarenakan, menggunakan sarana dan prasarana yang ada di Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

5. Pemantauan

Sistem pengendalian internal terhadap unsur pemantauan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang:

a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari segi

pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Dinas setiap jam kerja. Kepala Dinas selalu mengecek pegawai-pegawai, absen, dan sarana informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Dan selalu memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas masing-masing.

b. Evaluasi

Evaluasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik, setiap pengawasan internal yang dilakukan selalu dievaluasi seperti, rapat dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Evaluasi ini diharapkan untuk mendorong instansi pemerintah baik di pusat dan daerah secara konsisten dan dapat meningkatkan pencapaian kinerja pegawai.

c. Tindak Lanjut Audit

Tindak lanjut audit di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari perbaikan terhadap rekomendasi dalam temuan rapat yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan bukti-bukti bahwa berjalan dengan baik, semua komponen dalam pemantauan selalu menganalisis pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak lanjut audit.

4.2.1 Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Kinerja instansi pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan pada pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Dalam penyusunan laporan kinerja ini dipakai skala nilai peringkat kinerja untuk mengevaluasi capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Kriteria Penilaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 – 100	Memuaskan
76 – 90	Baik
66 – 75	Cukup
51 – 65	Kurang
≤ 50	Rendah

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli serdang

Berdasarkan tabel diatas bahwa peringkat kinerja pegawai setiap tahunnya berbeda-beda berdasarkan komponen-komponen yang dilaksanakan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang memiliki kinerja penilaian dengan kriteria “Baik” dengan nilai 76-90.

4.3 Pembahasan

4.1.3 Pengawasan Internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Unit pengawasan bertugas untuk mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengawasan Internal sangat penting dilakukan di instansi pemerintah tujuan dari pengawasan internal adalah memperoleh informasi, mencegah terjadinya penyimpangan, menilai kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan, mengetahui rencana-rencana kegiatan apa yang akan dilakukan. Pengawasan Internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Untuk menciptakan pengawasan yang benar-benar efektif dan berjalan sesuai rencana, maka diperlukan waktu yang tepat dalam penyelesaian suatu pekerjaan atau dengan kedisiplinan waktu. Pengawasan merupakan salah satu bagian penting bagi pimpinan sebuah organisasi untuk mendapatkan sistem pengawasan yang memadai dan efektif dalam membantu kelancaran perencanaan organisasi, agar terwujudnya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun pengawasan internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi di dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengawasan internal. Setiap Pimpinan di Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik. Tanpa ada kebijakan yang baik maka sebuah instansi tidak dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi yang sudah di terapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Penerapan

pengawasan internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang mengikut standart SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yaitu:

a. Integritas dan Etika

Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya (Schlenker, 2008). Sedangkan Secara umum etika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang nilai norma kebiasaan yang mendasari perilaku manusia mengenai baik, buruk, benar, salah, hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Seseorang yang beretika diatur oleh kode etik melalui perilaku moral suatu profesi dalam ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati. Tujuannya adalah untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang yang akan dilakukan oleh profesi.

Dengan adanya integritas dan etika di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dapat mencapai visi, misi, dan tujuan kinerja yang dilakukan oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kassubag Umum, Kassubag Program, Kassubag Keuangan, dan bidang-bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

b. Komitmen dan Kompetensi

Komitmen dan kompetensi sangat penting untuk pegawai. Kepala Dinas selalu mengarahkan pegawai untuk dapat bekerja secara professional dengan cara mengikuti bimbingan dan pelatihan terhadap para pegawainya yang diadakan oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah).

c. Kepemimpinan

Pimpinan memberikan intruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu

pimpinan harus berinteraksi secara intensif terhadap bawahannya agar setiap arahan yang disampaikan dapat langsung diterima dan dilaksanakan. Kemudian pimpinan selalu merespon dan memberikan tanggapan atas laporan yang diterima dari pegawai.

d. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang menyusun struktur organisasi sebagai tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang berdasarkan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

2. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arah kebijakan dilaksanakan dengan baik. Aktivitas pengendalian harus dirancang yang bertujuan untuk memaksimalkan kegiatan organisasi.

Dalam melakukan aktivitas pengendalian, terdapat prosedur atau pedoman yang harus dijalankan khususnya di lingkungan instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang aktivitas pengendaliannya dilakukan dalam pembinaan SDM dengan pelatihan kepada pegawai dalam sistem otorisasi instansi yang berlaku. Untuk sistem pencatatan, dokumen, adanya pemisahan fungsi tugas dan tanggung jawab.

3. Penilaian Resiko

Setiap aktivitas memiliki resiko termasuk aktivitas operasional, identifikasi resiko bertujuan untuk bagaimana resiko dinilai kemudian dikelola. Untuk melakukan penilaian resiko, tujuan atau target harus ditentukan dan dikaitkan sesuai dengan tingkatannya. Penilaian resiko dari faktor internal yaitu ditemukannya penurunan dan kendala pada laporan kinerja instansi.

Analisis resiko yaitu menemukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang melakukan kebijakan sesuai dengan Peraturan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi sangat penting tanpa adanya informasi segala proses pengendalian tidak dapat terlaksanakan dari pembentukan kebijakan, analisis resiko, hingga pengawasan internal yang dilakukan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan informasi dan komunikasi secara langsung dan terkomputerisasi dengan tujuan memudahkan waktu penyampaian. Hal ini dapat dilihat dari sistem yang diterapkan yaitu proses laporan keuangan dan absensi yang menggunakan fingerprint. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang telah menerapkan informasi dan komunikasi yang sudah baik dan terstruktur.

5. Pemantauan

Fungsi pemantauan dalam pengendalian intern adalah memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian berjalan dengan pedoman atau prosedur. Selain itu, dengan adanya pengawasan, dapat mengidentifikasi hal-hal dalam mencapai tujuan

di bidang perindustrian dan perdagangan. Pemantauan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang yaitu pemantauan yang dilakukan Kepala Dinas seperti, pengecekan pegawai di jam operasional, laporan keuangan, kinerja pegawai, melakukan rapat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan melakukan perbaikan pencatatan transaksi apabila telah ditemukan kesalahan.

4.2.3 Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Mengacu kepada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengamanatkan tekad bangsa secara bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Hal ini sesuai dengan peraturan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periode setiap tahun.

Setiap pegawai selalu mempertanggung jawabkan pekerjaannya sesuai dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Di dalam akuntabilitas terdapat perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja.

Di dalam akuntabilitas terdapat perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang merupakan acuan penyelenggaraan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahunan, juga sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari perencanaan kegiatan yaitu kegiatan apa yang akan dilaksanakan serta siapa yang melaksanakan, bagaimana pelaksanaannya.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang adalah pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang adalah informasi mengenai implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menilai tingkat implementasi, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

5. Pencapaian Kinerja

Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang adalah hasil dari kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan selama satu periode.

Dalam kriteria penilaian kinerja menggambarkan hasil penilaian realisasi kinerja setiap tahunnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 mengalami nilai realisasi kinerja yaitu 66-75 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja cukup, pada tahun 2020 mengalami nilai realisasi kinerja yaitu 76-90 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja baik, sedangkan pada tahun 2021 mengalami nilai realisasi kinerja yaitu 76-90 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja baik.

Perhitungan persentase pencapaian kinerja dapat dilihat berdasarkan komponen realisasi yang diharapkan dengan kriteria:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.
2. Jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang tidak baik.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dengan 5 (lima) indikator sesuai dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu, Lingkungan Pengendalian, Aktivitas Pengendalian, Penilaian Resiko, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Dalam indikator tersebut bahwa sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan prosedur. Tapi, harus ditingkatkan pada identifikasi resiko agar tidak berdampak pada sasaran dan program.
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020. Sehingga ada kegiatan dan sasaran yang tidak jalankan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus mengatasi kendala yang ada seperti, masih sulitnya melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Perindustrian dan Perdagangan dengan pihak terkait. Dikarenakan dalam pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan diperlukan adanya informasi dan komunikasi secara berkelanjutan antara Kementerian

Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara serta Dinas-Dinas terkait di Kabupaten Deli Serdang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang harus lebih meningkatkan pengawasan internal dalam informasi dan komunikasi. Dikarenakan, informasi dan komunikasi sangat penting, tanpa adanya informasi dan komunikasi pengawasan internal tidak akan berjalan dengan baik.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus meningkatkan kinerja setiap pegawainya dalam mengontrol pekerjaan yang sudah diberikan dan selalu memantau setiap pegawai.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lingkup penelitian ini terbatas untuk mengetahui pengawasan internal dan kinerja instansi pemerintah.
2. Dalam proses pengambilan data dan wawancara terjadinya kesulitan karena, harus menyesuaikan waktu kepada Kassubag Umum dan Bagian Program agar tidak terganggu waktu kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. In *PT.Remaja Rosdakarya Bandung*.
- Arifin Sabeni, I. G. (1997). Pokok-pokok akuntansi pemerintahan. In *Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta*,.
- Astuty, W. (2016). Peran Auditor Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(8), 1–21.
- Dwiyanto, A. (2002). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. In *UGM PRESS*.
- Eka Nurmala Sari, Muhyarsyah, N. S. W. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota SE-Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Hafsah, Ramdhansyah, & Siregar, H. sakti. (2017). Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Berkelanjutan Bangsa Berbasis Iptek*, 1(1), Hal. 1-10.
- Hall, J. A. (2002). Sistem Informasi Akuntansi. In *Jakarta : Salemba Empat*.
- Hanum, Z. (2009). Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pengeluaran Kas. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 08(02), 1–14.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2001), *Standar Pemeriksaan Akuntan Publik*. SA Seksi 319. Pertimbangan Atas Pengendalian Intern Dalam Audit Laporan Keuangan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun (1983) Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 7(2), 231–246.
- Kadarisman, M. (2013). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. In *Jakarta : Raja Grafindo Persada*,.
- LAN & BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. In *Jakarta: Penerbit LAN*.
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. (2003). Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. In *Yogyakarta : Andi*.

- Mifti, S., Lestarito, N. B., & Kowanda, A. (2009). Pengawasan Internal dan Kinerja (Suatu Kajian di Kantor Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri). *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14(3), 114–124.
- Mulyadi. (2007). Sistem Akuntansi. In *Yogyakarta : Salemba Empat*.
- Mulyadi. (2015). Perilaku organisasi dan perilaku kepemimpinan. In *Bandung: Alfabeta*.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun (2008) *Tentang Sistem Pengendalian Internal 2008*.
- PP-RI. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- Rai. (2008). Audit kinerja pada sektor publik. In *Jakarta : Salemba Empat*.
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD Se-Kota Medan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(7), 1–33.
- Sawyer. (2005). Internal Auditing. In *Salemba Empat: Jakarta*.
- Schlenker, B.R. (2008). Integritas Dan Karakter: Implikasi Dari Ideologi Yang Beretika Yang Berprinsip Dan Bijaksana. *Jurnal sosial dan psikologi*, 27(10), 1078-1125.
- Sihaloho dan Halim. (2005). Pengaruh Faktor-Faktor Rasional, Politik dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Gajah Mada*, 15(16), 774-790.
- Sugiyono. (2007). Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R7D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Sukmana, Wawan., Lia Anggarsari. (2009). Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Tadulako*, 4 (6), 70-82.
- Sulistiawaty, T. (2018). Pengawasan Internal Pada Produktifitas Kerja Pegawai. *Jurnal Universitas Madura*, 3(1), 1-19.
- Terry, George.(1960). Principles of Management (Third Edition). Illinois. Richard D. Irwin Inc. Homewood.
- Prawirosentono, S. (2008). Manajemen sumberdaya manusia dan kebijakan kinerja karyawan. In *Yogyakarta : BPF*.
- UU No. 22 Tahun (1999) *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) *Tentang Pemerintah Daerah*

Widanarto, A. (2006). Pengawasan Internal , Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah. *Jurnal FISIP Universitas Padjadjaran*, 12(1), 1–18.

LAMPIRAN

PROFIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur berdasarkan keputusan Gubernur No. 06.256.K Tahun 2002 tanggal 12 Mei 2002 yang menjalankan rencana kerja (Renja) Perencanaan Pembangunan Daerah yang disyaratkan dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang tahun 2014-2019 yang memuat rancangan prioritas program dan kegiatan yang akan direncanakan serta pendanaanya. Sebelum terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang pada Era otonomi Daerah ada dua lembaga instansi pemerintah yang di gabung atau Marger menjadi satu instansi yaitu Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang.

Ruang lingkup Dinas perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang memuat rancangan RKPD yang merupakan arah pembangunan yang menjadi komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2007 merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD Kab. Deli Serdang sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan. Peraturan No. 8 Tahun 2008 tentang , tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, penyusunan, rancangan awal RKPD, rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

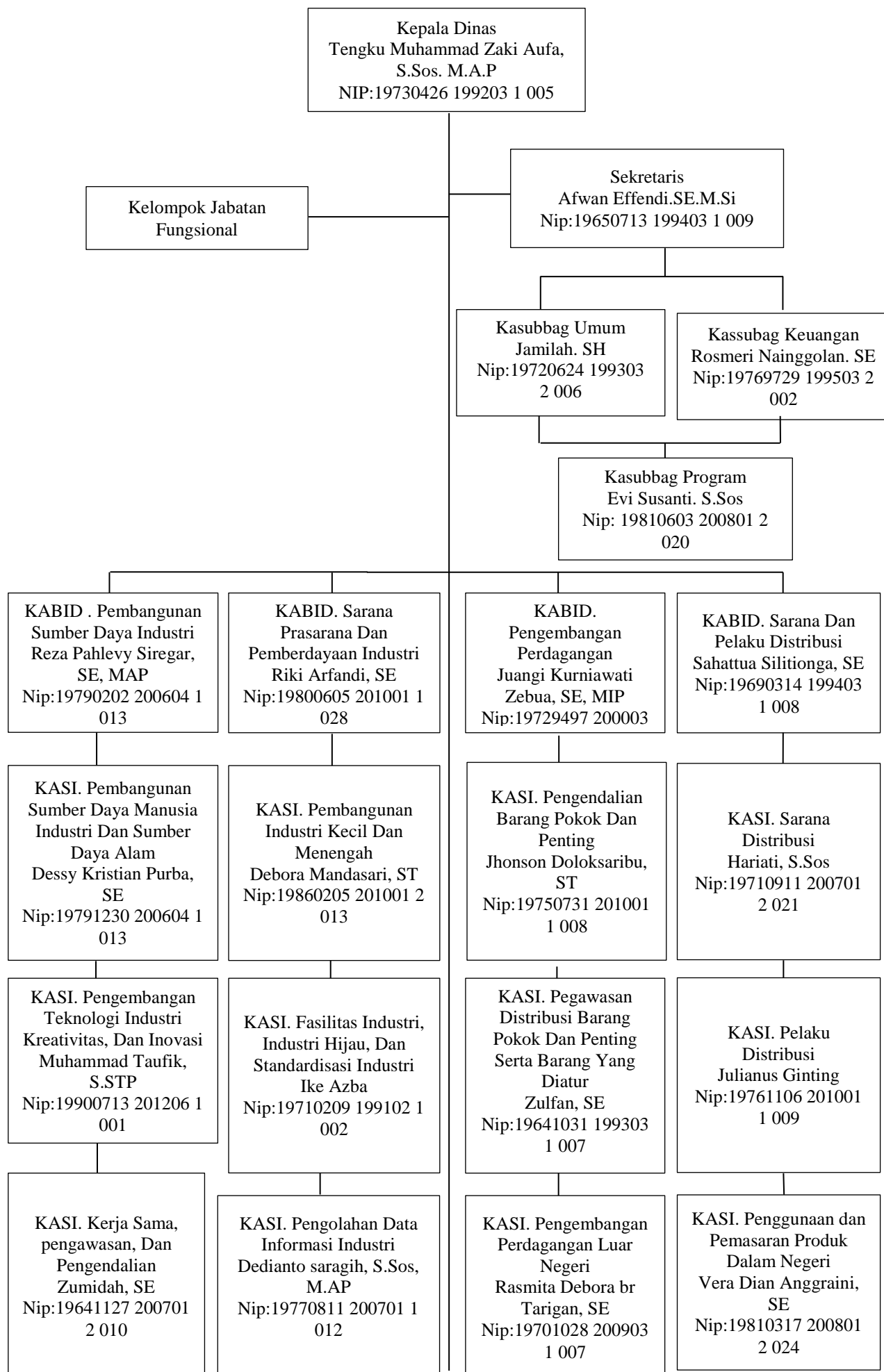
2. Visi dan Misi yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang

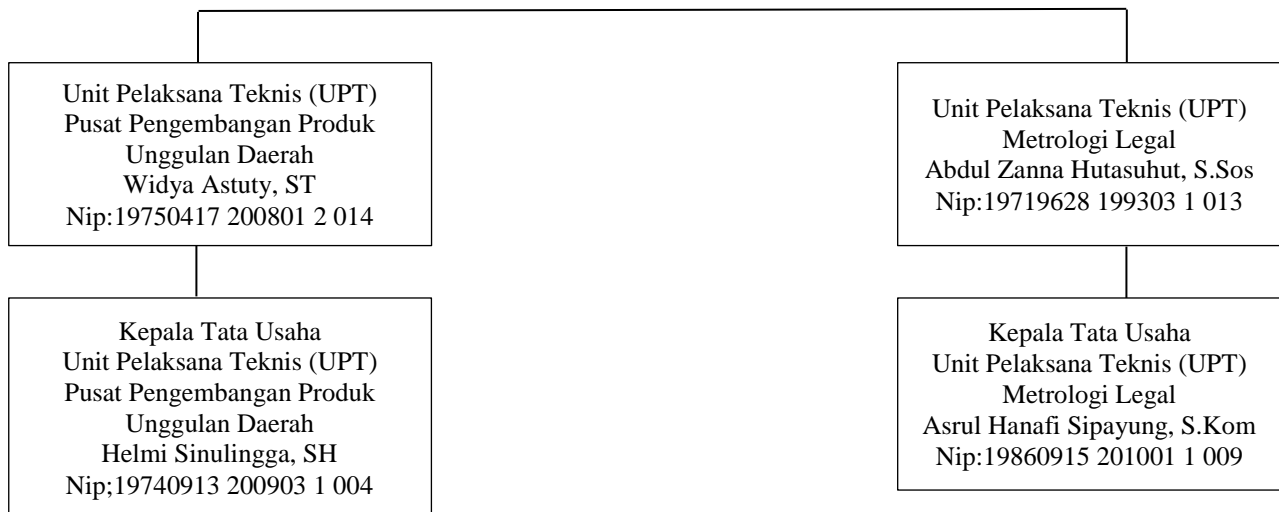
Visi : “Terwujudnya Industri dan Perdagangan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”

Misi :

1. Meningkatkan kemampuan industri yang berdaya saing, berbasis sumber daya alam, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha industri dan perdagangan.
3. Meningkatkan penguasaan pasar, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang





Gambar 2. 2 Struktur Organisasi

Adapun fungsi jabatan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- b. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas.

2. Sekretaris

- a. Membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas lingkup sekretariat.
- b. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program, dan keuangan.

3. Kepala Sub Bagian Program

- b. Membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum.

- c. Melaksanakan pengelolaan, perlengkapan tata usaha, dan barang milik negara/daerah.
4. Kasubbag Keuangan
 - a. Mengolah data dalam rangka pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas.
 - b. Merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan subbagian keuangan.
5. Kasubbag Program
 - a. Melaksanakan kegiatan dibidang program sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.
 - b. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
6. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
 - a. Membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.
 - b. Menyiapkan Perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan daerah.
7. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri
 - a. Membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri.
8. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan
 - a. Membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Pengembangan Perdagangan.
9. Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi

- a. Membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi.
- b. Melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi.

4. Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Tabel 1. 7 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah		Ket
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Orang	Kepala Dinas
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	Orang	Sekretaris
3.	Pembina (IV/a)	5	Orang	Kepala Bidang 3 Orang Kepala Saksi 1 Orang Pelaksana 1 Orang
4.	Penata Tk.I (III/d)	15	Orang	Kepala Bidang 1 Orang Kepala Saksi 6 Orang Kasubbag 2 Orang KUPT 1 Orang Pelaksana 5 Orang
5.	Penata (III / c)	16	Orang	Kepala Saksi 5 Orang KUPT 1 Orang KTU 1 Orang Pelaksana 9 Orang
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	33	Orang	Kasubbag 1 Orang
7.	Penata Muda (III/a)	12	Orang	KTU 1 Orang Bendahara 2 Orang Pelaksana 9 Orang
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	18	Orang	Pelaksana
9.	Pengatur (II/c)	11	Orang	Pelaksana
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	3	Orang	Pelaksana
11	Juru Muda Tk.I (I / b)	1	Orang	Pelaksana
	Jumlah.....	116		Orang

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

**Tabel 1. 8 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	S. II	7	Orang
2.	S. 1	68	Orang
3.	SARJANA MUDA	-	Orang
4.	SMA/SMK	40	Orang
5.	SMP	-	Orang
6.	SD	1	Orang
	Jumlah.....	116	Orang

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

**Tabel 1. 9 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Berdasarkan Jabatan**

No	Jenis jabatan/Eselon	Jumlah	Ket
1.	Kepala Dinas (Eselon II/b)	1	Orang
2.	Sekretaris (Eselon III/a)	1	Orang
3.	Kepala Bidang (Eselon III/b)	4	Orang
4.	Kepala Sub.bagian (Eselon IV/a)	3	Orang
5.	Kepala Seksi (Eselon IV/a)	12	Orang
6.	Kepala UPTD (Eselon IV/a)	2	Orang
7.	Kepala Tata Usaha (Eselon IV/b)	2	Orang
8.	Fungsional Umum (Staf)	91	Orang
	Jumlah.....	116	Orang

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan Kasubbag Umum Bagian Program

Daftar Wawancara Tentang Pengawasan Internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang

Nama Responden : Jamilah, SH dan Dessy Kristian Purba, SE.

Jenis Kelamin : Perempuan

Tabel 1. 10 Hasil Wawancara

Daftar Wawancara Tentang Pengawasan Internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ada hubungan antara pengawasan internal dengan kinerja instansi pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Ya, ada hubungan antara pengawasan internal dengan kinerja instansi pemerintah. Karena, pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan. Apabila tidak ada pengawasan internal maka akan terjadinya penyimpangan dengan kinerja pegawai.
2.	Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang telah melakukan pengawasan internal yang baik dan benar?	Ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang sudah melakukan pengawasan internal yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3.	Bagaimana sumber daya yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang untuk mendukung keefektifan pengawasan internal?	Sumber daya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi (Tugas, pokok, dan Fungsi) yang berlaku.
4.	Bagaimana sistem pengawasan internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Sistem pengawasannya seperti, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian. Informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
5.	Bagaimana lingkungan pengendalian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Baik, bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di

	Kab. Deli Serdang?	lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang. Di dalam lingkungan pengendalian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang terdapat, integritas dan etika, komitmen dan kompetensi, kepemimpinan, dan struktur organisasi.
6.	Bagaimana lingkungan pengendalian dalam aspek integritas dan etika di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Integritas dan etika baik, dikarenakan setiap pegawai harus mengisi absen masing-masing setiap harinya sesuai dengan waktu kehadiran, tujuan dari pengisian absen untuk melihat kejujuran pegawai yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.
7.	Bagaimana lingkungan pengendalian dalam aspek komitmen dan kompetensi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Komitmen dan kompetensi berjalan dengan baik, sesuai dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang. Setiap pegawai memiliki kompetensinya dalam melaksanakan tugas masing-masing. Pelaksanaan kompetensi dan bimbingan dilakukan yaitu pelatihan teknis tugas pokok masing-masing.
8.	Bagaimana lingkungan pengendalian dalam aspek kepemimpinan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Kepimpinan berjalan dengan baik, Setiap pimpinan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang menjalin hubungan baik dengan bawahan dan setiap keputusan yang dilakukan dengan cara meminta pendapat ketika ada masalah yang dihadapi dan pimpinan mengambil keputusan tidak dengan sepihak. Contohnya dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan kendala yang dialami dari pegawai dalam menjalankan tugas yang diamanatkan.
9.	Bagaimana lingkungan pengendalian dalam aspek struktur organisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Struktur organisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang telah disusun secara jelas dan sistematis, sehingga tidak ada tugas yang dirangkap dan dapat menimbulkan penyimpangan. Struktur organisasi menggambarkan uraian tugas yang jelas, tanggung jawab, fungsi tugas yang dapat memudahkan

		pekerjaan seseorang dengan adanya struktur organisasi yang dibuat oleh Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.
10.	Bagaimana aktivitas pengendalian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Baik, sesuai dengan pelaksanaan kebijakan dan prosedur dari berbagai bidang-bidang dalam melaksanakan tugas.
11.	Bagaimana aktivitas pengendalian dalam aspek pemisahan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Didalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang sudah ada pemisahan fungsi yaitu, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dan Bidang Pasar.
12.	Bagaimana aktivitas pengendalian dalam aspek dokumen data-data apa yang diperlukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Didalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang diperlukan dokumen dalam pengendalian intern yaitu, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan Data Anggaran biaya setiap tahunnya.
13.	Bagaimana aktivitas pengendalian dalam aspek pencatatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Didalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang pencatatan transaksi secara tepat waktu dan sesuai pedoman pencatatan.
14.	Bagaimana aktivitas pengendalian dalam aspek Sistem Informasi Akuntansi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Didalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang dari sistem operasi dan prosedur yang ada dilaksanakan dengan baik, dan setiap pegawai yang menjalankan tugasnya sesuai dengan rangkaian prosedur yang dimiliki oleh instansi. Laporan keuangan sudah termasuk anggaran, realisasi, dan persentase pencapaian setiap tahunnya.
15.	Bagaimana penilaian risiko pengawasan internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Didalam penilaian risiko masih ada yang diperbaiki seperti, identifikasi risiko untuk meningkatkan pengendalian intern di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang.
16.	Bagaimana penilaian resiko dalam aspek indentifikasi risiko di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli	Identifikasi resiko di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang belum optimal.

	Serdang?	Dikarenakan masih sulitnya melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan perindustrian dan perdagangan dengan pihak terkait secara terus-menerus.
17.	Bagaimana penilaian resiko dalam aspek analisis risiko di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Analisis resiko di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang berjalan baik untuk mengawasi pengendalian resiko dan menggunakan teknologi dibagian sektor industri dan sektor perdagangan.
18.	Bagaimana informasi dan komunikasi yang dilakukan pegawai dalam menyampaikan hasil kerja di berbagai bidang-bidang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Baik, selalu tepat waktu dalam menjalankan tugas masing-masing dari berbagai bidang-bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang dan seluruh pegawai saling kerja sama dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dan selaluu terkomputerisasi dalam menjalankan tugas.
19.	Bagaimana cara pemantauan yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Baik, setiap hari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang selalu memantau pegawai dari berbagai bidang-bidang dengan melihat kinerja pegawai dan pegawai selalu melakukan absensi.
20.	Bagaimana pemantauan dalam aspek pemantauan berkelanjutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Pemantauan berkelanjutan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari segi pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Dinas setiap jam kerja. Kepala Dinas selalu mengecek pegawai-pegawai, absen, dan sarana informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Dan selalu memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas masing-masing.
21.	Bagaimana pemantauan dalam aspek evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Evaluasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik, setiap pengawasan internal yang dilakukan selalu dievaluasi

		seperti, rapat dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Evaluasi ini diharapkan untuk mendorong instansi pemerintah baik di pusat dan daerah secara konsisten dan dapat meningkatkan pencapaian kinerja pegawai.
22.	Bagaimana pemantauan dalam aspek tindak lanjut audit Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Tindak lanjut audit di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari perbaikan terhadap rekomendasi dalam temuan rapat yang dilakukan.
23.	Bagaimana tahapan untuk penyelenggaraan pengawasan internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Baik, selalu ada tahapan persiapan yaitu tahapan awal dalam menyelenggarakan tugas masing-masing, tahapan pelaksanaan yaitu langkah dalam melaksanakan tugas, dan tahapan pelaporan yaitu tahap dalam melaporkan kegiatan yang telah dilakukan.

**Daftar Wawancara Tentang Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Deli Serdang**

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kinerja instansi pemerintahan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Baik. Karena, sudah sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dari berbagai bidang-bidang.
2.	Apakah seluruh pegawai sudah melakukan kinerja instansi pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang berlaku di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Ya sesuai dengan visi dan misi yang berlaku di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang.
3.	Bagaimana cara mempertanggung jawabkan kinerja instansi pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Caranya yaitu dalam bentuk dokumen LAKIP perangkat daerah setiap tahunnya sub komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dari kegiatan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang.
4.	Bagaimana perjanjian kinerja instansi pemerintahan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Penetapan perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang dilakukan pada awal tahun anggaran dan dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Penetapan perjanjian kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja atau sasaran strategis yang dilakukan setiap tahunnya.
5.	Bagaimana upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Dalam meningkatkan kinerja seluruh pegawai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, mengawasi, memimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan laporan, bertanggung jawab baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
6.	Apakah kondisi tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas kinerja pegawai di Dinas Perindustrian dan	Ya, sarana dan prasarana sangat meningkatkan kinerja pegawai,

	Perdagangan Kab. Deli Serdang?	
7.	Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?	Dokumen yang diperlukan yaitu laporan SPJ Fungsional (Surat Pertanggungjawaban) dari bagian keuangan.
8.	Bagaimana cara penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan benar?	Dengan cara mengumpulkan data-data dari bidang-bidang tertentu. Misalnya bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang perlindungan konsumen dan tata niaga, dan bidang pasar.
9.	Apakah penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selalu tepat waktu setiap tahunnya?	Iya. Setiap tahun mengalami perubahan dikarenakan, target, kinerja, dan pelaporan anggaran setiap tahunnya berbeda.
10.	Apakah dalam membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu adanya rapat antara kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang dengan seluruh pegawai?	Iya, diperlukan rapat internal sesuai dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang.
11.	Apakah setiap tahunnya ada keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program kinerja instansi pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Keberhasilan ada dalam setiap tahunnya yaitu, meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah. Kegagalan tidak ada. Tapi, ada kegiatan yang tidak terlaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19.
12.	Apakah ada kendala dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang?	Ada yaitu sumber daya aparatur yang relatif terbatas, proses penyelesaian administrasi anggaran yang belum efisien sering mengganggu jadwal yang telah disusun, dan dana pembinaan yang sangat terbatas apabila dikaitkan dengan target kinerja, banyak menghambat pencapaian target indikator kegiatan yang telah direncanakan.
13.	Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?	Cara mengatasi masalah yaitu, dalam rangka penyusunan program pembangunan industri dan perdagangan, kegiatan-kegiatan yang diusulkan perlu disinkronkan antara kebijakan atau program prioritas pada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara serta instansi terkait lainnya di kab. Deli Serdang sesuai dengan potensi nyata yang ada dan memberikan dampak pengembangan terhadap Kab. Deli Serdang.

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten DeliSerdang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dan perdagangan yang berkualitas.	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	4,39%
		Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	5,1%
2	Meningkatkan mutu produk IKM	Jumlah produk industri yang memiliki sertifikasi	15 IKM
3	Terwujudnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Tingkat disparitas harga barang kebutuhan pokok	5%
4	Meningkatkan kemampuan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan serta pelayanan metrology legal	Jumlah alat UTTP yang ditera dan tera ulang	36,750 UTTP

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi	Rp. 77.635.000	APBD
2	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdangan	Rp. 1.084.070.816	APBD
3	Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp. 126.703.200	APBD
4	Program peningkatan kemampuan Teknologi Industri	Rp. 679.260.000	APBD
5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 17.223.422.100	APBN/APBD
6	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp. 1.192.600.000	APBD
7	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Rp. 4.634.775.584	APBD
8	Program Promosi dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Rp. 3.738.430.000	APBD

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

DeliSerdang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Nilai PDRB Sektor Industri Nilai PDRB Sektor Perdagangan	30.67% 16.91%
2	Meningkatnya layanan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Nilai SKM	76 Poin 83.657%

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten DeliSerdang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Nilai PDRB Sektor Industri Nilai PDRB Sektor Perdagangan	30.67% 16.91%
2	Meningkatnya layanan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Nilai SKM	76 Poin 83.657%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 465.200.000	APBD
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp. 2.441.998.200	APBD/DID
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	0	APBD
4	Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri	Rp. 150.000.000	APBD/DID
5	Program Penataan Struktur Industri	0	APBD
6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 8.166.298.500	APBD
7	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	0	APBD
8	Program Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Ber-SNI	Rp. 4.109.708.045	APBD
9	Program Promosi dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Rp. 1.762.022.900	APBD

10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.328.351.720	APBD
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 527.187.000	APBD
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 22.000.000	APBD
13	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	0	APB D
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 66.102.000	APB D

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	17,5%	17,53%	100,17%
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Kecil dan Menengah dalam Perekonomian	Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	31,1%	31,05%	99,84%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Indeks	72 Poin	72 Poin	100%
		Kepuasan Masyarakat	78 Poin	78 Poin	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 11.536.144.832	Rp. 4.403.986.178	APBD
2	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 54.827.841	Rp. 46.178.000	APBD
3	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 2.014.311.560	Rp. 1.215.223.944	APBD
4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 870.398.152	Rp. 689.692.092	APBD
5	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Rp. 355.560.762	Rp. 251.954.000	APBD
6	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 7.389.449.923	Rp. 4.114.360.171	APBD/ APBN
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.377.149.677	Rp. 14.708.719.376	APBD

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

SASARAN 1						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai PDRB Sektor Perdagangan	32.26 %	31,61 %	96 %	32.88 %	31,61 %	96 %
Nilai PDRB Sektor Industri	16.87 %	16.55 %	0.98 %	16.87 %	16.55 %	0.98 %

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN 1						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai PDRB Sektor Perdagangan	32.26 %	31,61 %	96 %	32.88 %	31,61 %	96 %
Nilai PDRB Sektor Industri	16.87 %	16.55 %	0.98 %	16.87 %	16.55 %	0.98

3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

SASARAN 1						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai PDRB Sektor Perdagangan	16.87 %	16.55 %	0.98 %	17.5 %	17.53 %	100.17 %
Nilai PDRB Sektor Industri	32.88 %	31.61 %	96 %	31.1 %	31.05 %	99.84 %

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Putri Ayu Sushmita
 NPM : 1805170167
 Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Morawa, 02 Juli 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Anak Ke : 1 dari satu bersaudara
 Alamat : Tanjung Morawa, Gg Mupakat LK II No.155
 No. Telephone : 0821-6504-7861
 Email : putriayusushmita@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : OK Hadi Hamdan
 Pekerjaan : Pegawai Swasta
 Nama Ibu : Rolina
 Pekerjaan : Karyawan
 Alamat : Tanjung Morawa, Gg Mupakat LK II No.155
 No. Telephone : 0813-9647-7963
 Email : rolina2907@gmail.com

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Swasta Riama Tanjung Morawa

Sekolah Menengah Tingkat Pertama : MTS Nurul Ikhwan Tanjung Morawa
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Swasta Nusantara Lubuk Pakam

Medan, 14 Juli 2022

(Putri Ayu Sushmita)



Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 337/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
 Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 02 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Putri Ayu Sushmita
 N P M : 1805170167
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **Hj. Hafsah, SE., M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 17 Februari 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 16 Rajab 1443 H
 17 Februari 2022 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Pertinggal

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2471/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/19/1/2022

Medan, 19/1/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Putri Ayu Sushmita
NPM : 1805170167
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Adanya penerapan standar akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Terjadinya keterlambatan pelaporan realisasi anggaran di Desa Tanjung Morawa B kabupaten Deli Serdang.
3. Faktor-faktor yang mengalami penurunan terhadap kinerja pegawai di Dinas Pencatatan Sipil.

Rencana Judul : 1. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.
2. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tanjung Morawa B Kabupaten Deli Serdang.
3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang.

Objek/Lokasi Penelitian : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang, Kantor Kepala Desa Tanjung Morawa B, dan Dinas Pencatatan Sipil kab. Deli Serdang.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Putri Ayu Sushmita)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Makhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2471/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/19/1/2022

Nama Mahasiswa	: Putri Ayu Sushmita
NPM	: 1805170167
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul	: 19/1/2022
Nama Dosen pembimbing ^{*)}	: Hj. Hafisah, SE., M.Si (26 Januari 2022)
Judul Disetujui ^{**)}	: Analisis Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, 02 Februari 2022

Dosen Pembimbing


(Hj. Hafisah, SE., M.Si.)

Es-tampai

*) Disetujui Pempiso Program Studi

**) Disetujui Dosen Pembimbing

Selanjutnya disahkan oleh Wakil dan Dosen pembimbing, akan tetapi dan diwujudkan kemudian ke-2 ini pada form online "Ujibid Pengajuan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
 4 Februari 2022 M

Kepada Yth,
 Ketua/Sekretaris Program Studi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
 Di
 Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : P U T R I A Y U S U S H M I T A

NPM : 1 0 0 5 1 7 0 1 6 7

Tempat, Tgl. Lahir : T A N J U N G M O R A W A
 0 2 D U L I 2 0 0 1

Program Studi : Akuntansi /
 Manajemen

Alamat Mahasiswa : T A N J U N G M O R A W A G g
 M U F A K A T L K I I N O I S S

Tempat Penelitian : D I N A S P E R I N D U S T R I A N
 D A N P E R D A G A N G A N

Alamat Penelitian : J A L A N T A N J U N G G A R B U S
 K O M P K A N T O R P E M K A B
 D E L I S E P D A N G

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
 Ketua/Sekretaris Program Studi

(Signature)
 (LINA USAR HARAMP SE.M.II)

Wassalam
 Pemohon

(Signature)
 Putri Ayu Sahanita



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 335/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 16 Rajab 1443 H
 17 Februari 2022 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang
 Jln. Tanjung Garbus Komp. Kantor Pemkab Deli Serdang.
 di-
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Putri Ayu Sushmita
 Npm : 1805170167
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VII (Tujuh)
 Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




 Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
 1. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LUBUK PAKAM - 20514

E-Mail : disperindag@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 18 Februari 2022
 Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera
 Utara

di,-

Tempat

Nomor : 070/389/Perindag/Ins/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Persetujuan Izin Melaksanakan Riset


Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 335/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022 tanggal 17 Februari 2022 Perihal Izin Riset Pendahuluan, atas :

Nama : Putri Ayu Sushmita
 NPM : 1805170167
 Program Studi : Akuntansi
 Judul : Analisis Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal pada Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dapat menerima permohonan saudara, sepanjang mahasiswa dan mahasiswi yang dimaksud dapat mematuhi Peraturan dan Tata Tertib yang berlaku di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

a.n. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN DELI SERDANG
 SEKRETARIS


 AFWAN EFENDI, SE,MSi
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19650713 199403 1 009



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> *+ feb@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Nomor : 2052/IL3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 20 Dzulhijjah 1443 H
Lamp. : - 19 Juli 2022 M
Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang
Jln. Tanjung Garbus Komp. Kantor Pemkab Deli Serdang
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Putri Ayu Sushmita
N P M : 1805170167
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Internal Dan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

H. Juhri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Tanjung Garbus No. Telp.7951141 – 7955218 Komp. Kantor Pemkab. Deli Serdang

LUBUK PAKAM – 20514

E-mail : disperindag@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 26 - 07 - 2022

Kepada Yth:

Nomor : 070/1029/Perindag/DS/2022

Sifat : Biasa

Lampiran :

Hal : Selesai Melaksanakan Riset

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

di,-

Tempat

Berdasarkan surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang nomor : 070/389/Perindag/DS/2022 tanggal 18 Februari 2022 Perihal Persetujuan Izin Penelitian, atas :

Nama : Putri Ayu Sushmita

NPM : 1805170167

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Internal Dan Kinerja Instansi Pemerintah
Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli
Serdang

Bersama ini kami jelaskan bahwa nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan riset di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang .

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

an.KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SEKRETARIS



ANDI, SE,MSi

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NIP. 19650713 199403 1 009



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Putri Ayu Suslmita
NPM : 1805170167
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsa, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Format Penulisan Fenomena Penelitian	2/3/2022	<i>[Signature]</i>
Bab 2	Pengutipan Teori di Perbaiki	8/3/2022	<i>[Signature]</i>
Bab 3	Metode di Perbaiki	9/3/2022	<i>[Signature]</i>
Daftar Pustaka	Perbaiki	14/3/2022	<i>[Signature]</i>
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Kelengkapan Data	15/3/2022	<i>[Signature]</i>
Persetujuan Seminar Proposal	Sesuai Bimbingan	15/3/2022	<i>[Signature]</i>

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
(Assoc. Prof. Dr ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Medan, 15 Maret 2022
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

[Signature]
(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 31 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Putri Ayu Sushmita*
NPM. : 1805170167
Tempat / Tgl.Lahir : Tanjung Morawa, 02 Juli 2001
Alamat Rumah : Tanjung Morawa, Gg Mufakat Lk 2 No. 155
Judul Proposal : Analisis Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>di sempurnakan</i>
Bab I	<i>lahir belakang masalah dikurangi</i>
Bab II	<i>keni ditambahkan</i>
Bab III	
Lainnya	<i>istematika penulisan sesuai kan daftar pustaka ditambahkan</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 31 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsan, SE., M.Si

Pemanding

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 31 Maret 2022** menerangkan bahwa:

Nama : Putri Ayu Sushmita
NPM : 1805170167
Tempat / Tgl.Lahir : Tanjung Morawa, 02 Juli 2001
Alamat Rumah : Tanjung Morawa, Gg Mufakat Lk 2 No. 155
Judul Proposal : Analisis Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : **Hj. Hafrah, SE, Msi**

Medan, 31 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafrah, SE., M.Si

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si